

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF ZONATION SYSTEM FOR NEW STUDENT ADMISSIONS (PPDB) POLICY AT SMP NEGERI IN YOGYAKARTA

Retno Kussetyaningsih
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
retnokussetyan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data interaktif Miles Huberman. Adapun teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan PPDB secara teknis berjalan lancar, hal ini didukung oleh penggunaan sistem daring dan kebijakan yang jelas. Keberhasilan PPDB sistem zonasi berdampak pada peningkatan perluasan kesempatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta pada usia sekolah untuk mengenyam pendidikan. Faktor pendukung pelaksanaan PPDB adalah *data up to date* dan petunjuk teknis yang jelas, sedangkan faktor penghambatnya diantaranya masih kurangnya sosialisasi, kecurangan administrasi yang dilakukan oleh oknum orangtua, serta persebaran sekolah yang tidak merata

Kata kunci: Pendidikan, Implementasi, Kebijakan PPDB Zonasi

Abstract

This aims of this research is to describe the implementation of zoning system for the New Student Admissions (PPDB) policy at the State Junior High School in Yogyakarta and to determine the supporting and inhibiting factors in implementing the policy. This study is using a qualitative approach with a descriptive method. The data collection was carried out through interviews and documentation study. Miles Huberman models is using for analyse the data. The validity of the data used triangulation of sources and techniques. The results of this research indicate that the implementation of PPDB policies is technically running smoothly, this is supported by the use of an online system and clear policies. The success of the PPDB zoning system has an impact on increasing the expansion of opportunities for the people of Yogyakarta at school age to get education. The supporting factor for PPDB implementation is data up to date and clear technical instructions, while the inhibiting factors include the lack of socialization, administrative fraud committed by parents, and the uneven distribution of schools

Keywords: Education, Implementation, PPDB Zoning Policy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Oleh karenanya pendidikan di Indonesia telah lama memperoleh perhatian khusus, hal ini dibuktikan dengan terus diperbaikinya sistem pendidikan yang ada. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan mutu pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Usaha pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan terutama berkaitan dengan pemerataan pendidikan sudah bergulir sejak tahun 1984 hingga saat ini, salah satunya adalah melalui kebijakan PPDB.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru berupa penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik secara *online* maupun *offline* (Aprilia, 2017:23). Metode yang sering digunakan dalam pelaksanaan PPDB adalah melalui metode seleksi ataupun promosi. Kedua metode tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, namun satu hal yang sangat terasa ketika penerapan kedua metode tersebut adalah munculnya kompetisi antar satu sekolah dengan sekolah yang lain yang menyebabkan munculnya segregasi pendidikan. Sebagai usaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut dikelurkanlah kebijakan mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

PPDB sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan menekankan jarak atau radius antara rumah siswa hingga ke sekolah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menyinergikan tripusat pendidikan, untuk memberikan kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Pemerintah Kota Yogyakarta merumuskan kebijakan pendidikan terkait penyelenggaraan PPDB berbasis zonasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlaku di Kota Yogyakarta untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Peraturan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan PPDB di kota Kota Yogyakarta memiliki kuota 90% dari jalur zonasi dalam daerah (10% bibit unggul, 30% zona wilayah, 10% keluarga tidak mampu, 40% zonasi mutu), 5% jalur luar zonasi, dan 5% berasal dari jalur perpindahan tugas orangtua/ wali dan kemaslahatan guru dan dilaksanakan secara *real time online/* daring.

Sistem penentuan jarak pada PPDB Zonasi Kota Yogyakarta adalah melalui jarak udara yaitu jarak antara dua titik dari RW ke sekolah berdasarkan peta wilayah Kota Yogyakarta tahun 2016. Kota Yogyakarta sendiri memiliki 14 Kecamatan dengan 16 sekolah yang persebarannya mendominasi di bagian utara dan barat wilayah Kota Yogyakarta. Dominasi ini mengakibatkan empat kecamatan di Kota Yogyakarta masuk ke area *blankspot* karena tidak memiliki sekolah diwilayahnya.

Hasil pra penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2019 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat

persaingan yang ketat pada 6.423 jiwa anak usia sekolah untuk mendaftar ke SMP Negeri, hal ini dikarenakan daya tampung yang dimiliki sekolah negeri hanya berkisar 3.487. Keketatan ini dapat terlihat dari dua kecamatan terpadat di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman karena ketimpangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan ketersediaan SMP Negeri di wilayah tersebut. Selain dua kecamatan tersebut, masih ada satu kecamatan yang merasakan tingginya angka keketatan pendaftaran karena letaknya yang berdekatan dengan area *blankspot*, daerah tersebut adalah Kecamatan Mantrijeron.

Dilain sisi Kota Yogyakarta juga masih menghadapi permasalahan terkait kepercayaan orangtua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berprestasi. Pernyataan ini didukung oleh data yang dihimpun oleh Ombudsman RI perwakilan DIY bahwa sejumlah orangtua melaporkan kondisi kesehatan mental anaknya yang mulai terganggu dan hilangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan karena tidak dapat melanjutkan di sekolah yang diimpikan. Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian untuk melihat implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan faktor

penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta” ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan dituliskan secara deskriptif, sehingga dalam penelitian ini peneliti menuliskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan sistematika penelitian. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara terperinci mengenai implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Agustus 2020 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMP Negeri 13 Yogyakarta.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi titik

perhatian dari suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka *Key informan* dalam penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Data, dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditingkat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Informan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan orang tua dipilih secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu guna mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan merupakan wakil kepala sekolah dari SMP Negeri yang berlokasi di kecamatan yang padat penduduk serta memiliki input nilai yang tinggi atau rendah, sedangkan orang tua yang dipilih merupakan orangtua peserta didik yang terkena dampak dari kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta karena mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta berdasarkan proses kebijakan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan 2 Sekolah Menengah Pertama di Kota Yogyakarta

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

wawancara pada informan yang memiliki informasi mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta yaitu Staff Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Data, dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta orangtua. Selain wawancara, teknik lain yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dokumen yang digunakan diantaranya arsip hasil pelaksanaan PPDB tahun 2019 dan produk hukum dasar implementasi kebijakan PPDB.

Instrumen Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai instrumen dalam penelitian keduanya tentu saja memiliki kisi-kisi pedoman yakni:

1. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta yang terdiri atas empat variabel yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan PPDB, variabel lingkungan serta tahapan implementasi kebijakan dan yang terakhir adalah faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kegiatan dan segala sumber yang mendukung implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta seperti data hasil pelaksanaan PPDB, arsip dasar-dasar hukum pelaksanaan kebijakan, dan data mengenai jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan data usia tunggal.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles & Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan untuk menyeleksi data hasil penelitian sesuai dengan yang diperlukan kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi sumber berfungsi untuk mengkomparasikan data hasil wawancara dari sumber/informan yang berbeda untuk menguji keabsahan data agar sesuai dengan tujuan dari penelitian, sedangkan triangulasi teknik, digunakan untuk membandingkan data yang diambil melalui wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Jenjang SMP Negeri Di Kota Yogyakarta

Analisis implementasi pada penelitian ini menggunakan teori milik Mazmanian dan Sabatier yang membaginya menjadi empat variabel yaitu kriteria masalah, kriteria kebijakan, variabel lingkungan, dan tahapan implementasi kebijakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

a. Karakteristik Masalah Kebijakan

Kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada setiap satuan pendidikan. Kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan *top down*, sehingga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta peraturan tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019. Pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk terlaksananya desentralisasi kebijakan pendidikan.

Kebijakan PPDB yang diselenggarakan di wilayah Kota Yogyakarta memiliki beberapa perbedaan dengan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari jumlah kuota yang dimiliki setiap jalur serta penambahan jalur seperti bibit unggul, mutu, dan KMS. Perbaikan ini membawa manfaat bagi sekolah maupun masyarakat secara umum yaitu memunculkan keberagaman input peserta didik baik dari latarbelakang ekonomi, sosial, maupun kemampuan akademis sehingga semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di SMP Negeri.

Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi secara teknis tidak mengalami kendala yang berarti hal ini didukung penggunaan sistem *real time online* atau daring sehingga orang tua dan calon peserta didik dapat mengakses dan meng-*update* data dimana saja dan kapan saja. Meskipun demikian, kelompok sasaran yang beragam tetap mampu memunculkan perbedaan pandangan mengenai implementasi kebijakan, terutama jika dilihat dari persebaran kepadatan penduduk dan penguasaan teknologi yang kaitannya dengan pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

Pemberlakuan PPDB sistem zonasi menyebabkan sekolah melakukan adaptasi secara cepat terutama kaitannya dengan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, hal ini ditujukan untuk menjaga

mutu lulusan yang dihasilkan meskipun input diawal berragam. Jumlah kelompok sasaran kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta adalah 26.074 jiwa dari total penduduknya yaitu 413.826 jiwa. Jumlah yang demikian tentu saja bukan jumlah yang kecil, namun baik masyarakat maupun sekolah memiliki harapan yang sama yaitu mampu bekerjasama untuk pendidikan peserta didik agar menjadi lebih baik.

b. Karakteristik Kebijakan

Kejelasan isi kebijakan dalam suatu implementasi memiliki nilai penting, hal ini karena berkaitan dengan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta yang minim aduan merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibuat dapat dipahami oleh masyarakat meskipun secara garis besar. Hal lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan selain kejelasan isi kebijakan ada juga, keterpaduan hirarkis antar lembaga pelaksana. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi menggandeng beberapa institusi yang terkait untuk membantu kelancaran implementas, lembaga tersebut diantaranya Kominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ombudsman RI perwakilan DIY, dan Forum

Masyarakat Yogyakarta Istimewa Peduli Pendidikan.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 yang didalamnya terdapat pembaharuan berupa penambahan jumlah jalur masuk dan kuotanya menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dengan mendengar saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Implementasi PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta menggunakan sumber daya finansial yang berasal dari APBN yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Peran serta sekolah dalam penyusunan kebijakan yang bersifat teknis sangat dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena hal tersebutlah yang akan bersinggungan secara langsung degan sekolah.

c. Variabel Lingkungan

Melihat kondisi sosial, ekonomi, dan penguasaan teknologi di wilayah Kota Yogyakarta yang beragam tentu saja menimbulkan persepsi mengenai urgensi kebijakan yang berragam di tataran masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk dan memiliki jarak sekolah dengan pemukiman yang jauh tentu saja akan merasa dirugikan dengan adanya pemberlakuan kebijakan ini. Lain halnya

dengan masyarakat yang memiliki nilai akademis rendah namun bermukim dekat dengan sekolah, maka ia akan merasa diuntungkan karena memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah di SMP Negeri.

Keberagaman yang tercipta di masyarakat bukan saja menimbulkan perbedaan persepsi, melainkan juga menimbulkan berbagai macam desakan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih luwes. Pernyataan tersebut terbukti dengan adanya perbaikan peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan PPDB zonasi di Kota Yogyakarta. Kemampuan Dinas dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan saran serta kritik masyarakat menjadikan masyarakat Kota Yogyakarta lebih mendukung dan taat terhadap pelaksanaan kebijakan. Namun, disetiap pelaksanaan kebijakan pasti harus ada perbaikan, pun demikian dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan mengenai munculnya kecurangan administrasi kependudukan dan ketimpangan persebaran sekolah.

d. Tahapan dalam Proses Implementasi

Sebagai sebuah kebijakan masyarakat maupun pemerintah mengharapkan bahwa luaran kebijakan PPDB zonasi adalah mampu meningkatkan pemerataan kualitas

pendidikan, sebagaimana yang tertera sebagai tujuan pelaksanaan PPDB zonasi yang termaktub di Permendikbud. Harapan masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun 2019 dapat terwujud, hal ini dibuktikan dengan terbukanya kesempatan yang luas dan sama untuk mengenyam pendidikan. Namun, masih ditemukan adanya kecurangan berkaitan dengan administrasi yang dilakukan oleh oknum orang tua serta penumpukan peserta didik di suatu sekolah akibat ketimpangan jumlah sekolah, sehingga kondisi yang demikian ini dianggap mampu menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang berupa pemerataan kualitas pendidikan.

Berkaitan dengan pemenuhan dan ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku, masyarakat dapat mengikuti dengan baik, hal ini karena adanya sanksi yang tegas apabila tidak mau memenuhi persyaratan yang tertera di dalam kebijakan yaitu berupa sanksi diskualifikasi dari pelaksanaan PPDB. Ketaatan serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku sangat berdampak terhadap peningkatan APK sebesar 2,49%, APM 0,5%, dan APS sejumlah 0,22% jika dibandingkan tahun 2018. Peningkatan ini mengindikasikan makin besarnya perluasan kesempatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta pada usia sekolah untuk mengenyam pendidikan. Meskipun terjadi peningkatan kesempatan, masyarakat tetap berharap adanya perbaikan

kebijakan berupa makin matangnya pelaksanaan sosialisasi agar dapat diakses oleh semua masyarakat, penyelesaian masalah atas kecurangan administrasi kependudukan dan ketimpangan persebaran sekolah yang terjadi di Kota Yogyakarta.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta diantaranya teknis pelaksanaan yang jelas sehingga meminimalisir jumlah aduan yang masuk, kesiapan peralatan dan sumber daya manusia ditingkat sekolah, penggunaan sistem daring yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi diantaranya keterlambatan masyarakat dalam mengakses informasi karena sosialisasi yang belum maksimal, oknum orang tua yang belum tertib administrasi, dan persebaran sekolah yang tidak merata sehingga mengakibatkan timbulnya *blankspot* dan peningkatan rentang keketatan di sejumlah wilayah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta secara teknis tidak banyak mengalami kendala, hal ini dikarenakan

penggunaan sistem *real time online* yang efisien serta adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Kejelasan isi kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan bentuk ketrampilan serta kemampuan Dinas Pendidikan dalam mendengar dan mengakomodir saran serta kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk dukungan publik untuk perbaikan implemetasi kebijakan di tahun-tahun selanjutnya. Kondisi masyarakat yang beragam dari segi ekonomi, sosial, serta penguasaan teknologi tentu saja menyebabkan respon terhadap kebijakan PPDB yang berbeda, hal ini tercermin dari aduan yang masuk ke pos pegaduan yang didirikan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Aduan yang masuk dari masyarakat banyak mengenai kecurangan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh oknum orangtua peserta didik, penumpukan calon peserta didik di suatu sekolah serta keluhan mengenai sosialisasi yang dianggap kurang. Dalam penyelesaian aduan yang masuk, Dinas Pendidikan banyak mengikutsertakan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang terkait aduan tersebut sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan kebijakan. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi memberikan dampak yang signifikan berkaitan dengan perluasan kesempatan bagi

masyarakat Kota Yogyakarta pada usia sekolah untuk mengenyam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari naiknya APK sebesar 2,49%, APM 0,5%, dan APS sebesar 0,22%. Keberhasilan ini tidak menyurutkan harapan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan PPDB dan penyelesaian masalah yang masih timbul di PPDB tahun 2019 agar tidak terulang kembali di PPDB tahun berikutnya.

2. Faktor pendukung implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada Jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta diantaranya teknis pelaksanaan yang disusun secara jelas dan runtut, kesiapan peralatan dan SDM ditingkat sekolah untuk melaksanakan PDB sistem zonasi, penggunaan sistem daring/ *real time online* yang mempermudah dalam meng-*update* data, serta munculnya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Yogyakarta adalah keterlambatan masyarakat dalam mengakses informasi, adanya oknum orangtua yang belum tertib administrasi, dan persebaran sekolah serta calon peserta didik yang tidak merata yang menyebabkan munculnya area *blankspot*.

Saran

Sebagai upaya memberikan masukan kepada pengambilan kebijakan, maka dari

hasil kajian penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

- a) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebaiknya dalam melaksanakan sosialisasi intensitasnya perlu ditambah dan hingga menjangkau masyarakat dalam lingkup terkecil agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap kebijakan yang akan diberlakukan.
- b) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu melakukan pemerataan persebaran sekolah, fasilitas sekolah, dan kualitas guru yang ada di Kota Yogyakarta karena hal-hal diatas merupakan memiliki urgensi yang tinggi untuk mendukung keberhasilan tujuan kebijakan terkait pemerataan pendidikan.

2. Bagi Sekolah

- a) Untuk dapat meningkatkan mutu sekolah ditengah beragamnya input peserta didik, sekolah perlu untuk memiliki strategi berupa pembuatan program khusus terkait pembelajaran agar seluruh peserta didik dapat nyaman belajar di sekolah.
- b) Agar kualitas guru turut meningkat, sekolah juga perlu memunculkan inisiatif untuk membuat beragam program pelatihan atau pengayaan bagi guru di sekolah.

3. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

- a) Pemerintah sebaiknya dapat terus melanjutkan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan.
- b) Pemerintah Kota Yogyakarta dapat ikut mendorong lembaga lain diluar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk melakukan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi.
- c) Bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meyakini sanksi yang tegas bagi sekolah maupun masyarakat yang melakukan tindak kecurangan selama proses pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, K. (2019). *Dampak Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ali, I. (2016). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akhidah, A. (2015). *Persebaran Pilihan Siswa Masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri (SMP Favorit dan Tidak Favorit) di Kota Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asri, U,dkk. (2016). *Jurnal Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2019). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2020*. Yogyakarta: CV Addhuha Production.
- Dasuha, O. F.. (2016)..*Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online di Salatiga*. Salatiga: Artikel Universitas Kristen Satya Wacana.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. *Penyajian Data Kependudukan Usia Tunggal Tahun 2019*. Diunduh pada tanggal 30 Agustus 2020 dari <http://kependudukan.jogjakota.go.id/>
- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. (2019). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/425*.
- Ghani, A dan Lockhart, C. (2008). *Fixing Failed States: A Framework For Rebuilding A Fractured World*. Oxford: University Press.
- Hakim, L. (2016). *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal eduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016. Diunduh dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>.
- Hermin,dkk. (2017). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya
- Kementerian Pendidikan. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Indikator Pendidikan di Indonesia Tahun 2015/2016*. Kemendikbud: Jakarta diunduh dari http://publikasi.data.kemendikbud.go.id/uploadDir/isi_7DD788FE-48D9-4CFB-AF33-A3E0137975CE.pdf diakses pada 1 Desember 2019
- (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada*

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

(2019). *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

(2019). *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah.* Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2020 dari <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>

(2019). *APM/APK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kota Yogyakarta.* Diunduh pada tanggal 31 Agustus 2020 dari <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Lestari, dkk. 2018. Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017.* Surabaya: Jurnal Mahasiswa UNESA di unduh dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237> pada 1 Desember 2019

Muktiana, N. (2019). *Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta.* Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurlailiyah, A. (2019). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta.* Kediri: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan IAIN Kediri.

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2016). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.*

(2019). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*

Pujianti, D. (2012). *Upaya Pemerataan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.* Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. (2019). *Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Eka, R. (2007). *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia.* <http://edu-articles.com>. Diakses 16 November 2019

Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi.* Bandung: Pustaka Setia.

Subarsono, AG. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan.* Yogyakarta: FIP UNY.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Bandung: Alfa Beta.

Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025.* Bandung: PT Raharja Rosdakarya.

Sutiman & Raharja, Setya. (2002). *Perencanaan Pendidikan Mikro.* Yogyakarta: FIP UNY.

Tilaar, H.A.R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R., dan Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-
- (2003).
Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing
- Wahab, S.A. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.